

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 06
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 26 Januari 2016
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; - Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015; dan - Pemaparan DIPA Tahun 2016
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 37 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Dr.Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal); 3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektorat Jenderal); 4. Dr.Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari); 5. Dr.Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung); 6. Dr.Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem); 7. Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); 8. Dr.Ir. Bambang Soepijanto, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia); 9. Dr.Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim); 10. DR.Ing.Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 11. Ir. Tuti Hendrawati Minratsih, MPPM. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya); 12. Dr. Henry Bastaman, MES. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi) 13. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan 14. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dan Pemaparan DIPA Tahun 2016, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Semester I Tahun 2015 dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan berbagai temuan baik yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI, sistem pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan BPK RI pada tahun mendatang.
2. Komisi IV DPR RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas realisasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 sebesar Rp5.759.305.585.522,- atau 86,48% dari Pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp6.660.752.124.000,- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih meningkatkan serapan pada APBN Tahun Anggaran 2016.
3. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut untuk menyampaikan target dan rencana program dan kegiatan restorasi lahan gambut untuk 5 (lima) tahun ke depan, termasuk kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut untuk membahas masalah ini.
4. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Perum Perhutani dan PT. Inhutani I, PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, PT. Inhutani IV, dan PT. Inhutani V, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan kawasan hutan yang dikelola BUMN Kehutanan tersebut, sehingga diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari.
5. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat beberapa pusat pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, serta pusat pengelolaan sampah terpadu di daerah yang dekat dengan sumber limbah dan sampah.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan pembentukan Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sudah lewat jatuh tempo pada bulan Agustus 2015 (2 tahun setelah UU diundangkan) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Ttd.

DR. IR. SITI NURBAYA, M.SC.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.
A-335

